

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Lembaga komunikasi sosial merupakan kelembagaan masyarakat baik formal atau nonformal dan memiliki kegiatan di ranah pengolahan informasi. Kelembagaan komunikasi sosial mempunyai jaringan komunikasi kepada anggota dan masyarakat lingkung yang berpotensi untuk penyebaran informasi, penyerapan serta wadah aspirasi publik. Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) merupakan salah satu bentuk kelembagaan komunikasi sosial. KIM merupakan lembaga layanan publik yang disusun, dikelola, diperuntukkan kepada masyarakat yang berorientasi di layanan informasi serta pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. KIM disosialisasikan Diskominfo di tahun 2011 yang dilandaskan pada keputusan kementerian komunikasi dan informatika. KIM bertujuan untuk pengembangan pengelolaan lembaga komunikasi sosial yang di jadikan sarana komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat secara langsung[1].

Dengan adanya Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa “Keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan *public*”[2]. Hal tersebut semakin mendorong pentingnya kehadiran Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagai media pelayan informasi[3]. KIM merupakan mitra dialog pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam merumuskan kebijakan publik. Selain itu, KIM berperan dalam peningkatan literasi bidang informasi, media massa, teknologi komunikasi, hingga sebagai wadah yang memiliki nilai ekonomis [1].

KIM dibentuk di Desa/Kelurahan yang disahkan dengan SK dari Desa/Kelurahan. Di Kabupaten Ponorogo terdapat 21 KIM yang telah aktif dalam berbagai kegiatan serta memiliki portal media sosial.

Pada penerapannya KIM juga memiliki fokus untuk meningkatkan eksistensi daerah dan perekonomian. Tidak sedikit pula dari setiap desa yang mempunyai KIM juga ikut berperan aktif dalam pengembangan potensi desa mulai dari wisata, media informasi, hingga kuliner. Dari berbagai jenis kegiatan tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ponorogo (Kominfo Ponorogo) harus menentukan desa terbaik yang sudah resmi memiliki KIM untuk dijadikan kandidat terbaik yang nantinya akan diikutsertakan dalam program Kualifikasi KIM Desa Terbaik se-Jawa Timur bahkan hingga tingkat Nasional [4]. Hal ini bertujuan untuk memberikan apresiasi serta menumbuhkan semangat berinovasi, berkompetisi, kolaborasi antar KIM, dan *branding*.

Terdapat beberapa fokus kriteria berdasarkan pedoman SK KIM Provinsi Jawa Timur untuk menentukan KIM terbaik diantaranya *Event*, Sosial Media, *Website*, dan Sanksi. Keempat kriteria tersebut memiliki 3 sifat *benefit* dan 1 bersifat *cost* (memaksimalkan nilai minimum). Belum ada sistem untuk menentukan pilihan KIM terbaik di dinas Kominfo Ponorogo. Demikian juga, pengambilan penilaian kriteria yang ada dari pihak Kominfo Ponorogo hanya berdasarkan *update* informasi serta ketika *survey* dan bimbingan teknis saja. Sehingga dapat menimbulkan kurangnya transparansi dalam proses penilaian dan proses administrasi yang kurang tertib[5]. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses pemilihan KIM terbaik serta *Monitoring* KIM di Ponorogo.

Pada kasus penelitian terdahulu oleh Albert Riyandi dan Aji Sudipyo pada tahun 2019 tentang *Decision Support System* pemilihan *Vendor* IT dengan penelitian menggunakan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*[6]. *Vendor* GA terpilih menjadi *Vendor* peringkat pertama dengan hasil perengkingan dengan nilai 44,18%. Oleh karena itu, pada permasalahan ini perlu sebuah sistem pendukung keputusan yang menjadi parameter dan tolak ukur serta sebagai salah satu solusi efektif, efisien, aman, dan kecepatan akses. Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam permasalahan ini. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung pengambilan keputusan yang kompleks dan memerlukan analisis yang lebih rinci. SPK menggabungkan konsep dan metode dari berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu komputer, matematika, statistik, ekonomi, dan manajemen, untuk memberikan informasi yang relevan dan akurat kepada pengambil keputusan[5]. Dalam penerapannya memerlukan sebuah algoritma untuk menyelesaikan sistem ini. Salah satu algoritma yang akan digunakan untuk penyelesaian ini adalah *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. *AHP* merupakan alat untuk memahami permasalahan yang kompleks dengan menyusunnya menjadi tingkatan. Pada kasus ini *AHP* dibutuhkan karena konsep implementasi untuk menentukan alternatif terbaik KIM terbaik dengan beberapa kriteria yang ada dapat diterapkan sesuai dengan algoritma *AHP*

AHP (Analytical Hierarchy Process) yaitu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty di tahun 1980-an. *AHP* digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan melibatkan banyak kriteria yang saling terkait dan memungkinkan pengambil keputusan untuk mengatasi subjektivitas dalam penilaian [5]. Metode ini akan diterapkan pada permasalahan yang sudah dipaparkan dalam penelitian dengan judul **“MENENTUKAN PILIHAN TERBAIK KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) DI KABUPATEN PONOROGO DENGAN PENERAPAN METODE *ANALYTICAL HIERARCHY PROCCESS (AHP)*”**

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Bagaimana memilih alternatif KIM terbaik di wilayah Kabupaten Ponorogo menggunakan algoritma *Analytical Hierarchy Process (AHP)* ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Menentukan alternatif Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) terbaik di wilayah Kabupaten Ponorogo dengan penerapan metode *Analytical Hierarchy Process (AHP)*. Serta system dapat digunakan secara berkala untuk meningkatkan KIM di Ponorogo.

1.4. BATASAN MASALAH

Beberapa batasan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini berfokus pada perbandingan terbaik Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di Ponorogo.
2. Perancangan *system* berbasis *website* dengan menggunakan bahasa pemrograman *Java*, digunakan untuk admin dalam melakukan pengelolaan *data* dan *user*.
3. Penelitian dilakukan pada 21 *KIM* di beberapa Desa yang sudah terintegrasi bersama dengan Kominfo Ponorogo per tahun 2023.
4. Kriteria yang digunakan *Event*, Media Sosial, *Website*, Sanksi

1.5. MANFAAT PENELITIAN

Beberapa manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Memberikan solusi yang efektif dan efisien dalam mengatasi masalah dalam menentukan pilihan terbaik KIM di Ponorogo.
- Meningkatkan kualitas dan kredibilitas Desa yang memiliki KIM di Ponorogo.
- meningkatkan daya saing dari setiap KIM agar menjadikannya lebih baik secara bertahap.
- Mempermudah pemantauan dan *Update* terkini KIM di Ponorogo.